

KONTESTASI ANTARA MUSLIM FUNDAMENTALIS DAN MUSLIM LIBERAL DALAM PEREBUTAN MAKNA SOSIAL KEAGAMAAN DI INDONESIA

Nur Hidayat Wakhid Udin
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: nhwahiduddin@gmail.com

Abstract: Islam is a religion that highly respects and appreciates the values of humanity and puts strong emphasis on the creation of peace and harmony among humankind. It rejects and even condemns violent actions in any form with any means. However, the facts show us that ideological and political contestation, among the existed groups in Islam, often lead to open conflict, as can be observed in several cases. The article attempts to portray the contestation of Islamic Fundamentalist group and Islamic Liberal group in Indonesia. Although there have been many studies conducted and published on this issue, I see yet the importance of discussion about the issue. The significance could be observed in the fact that it is one of socio-religious problems faced by the Muslim community around the world, including Indonesia. Employing descriptive-qualitative approach the study stresses that different perspectives used and dissimilarly opposite interpretation produced by each group in understanding and interpreting the religious texts have resulted in massively deep but even hot contestation between the two groups. While the Islamic Fundamentalist group tends to see the holy texts in their narrow and rigid understanding, the Islamic Liberal one understands the texts loosely and, to a lesser extent, unrestrained.

Keywords: Fundamentalism; Liberalism; contestation; socio-religious problem.

Pendahuluan

Tulisan ini memfokuskan pembahasan terhadap kontestasi antara kelompok Islam Fundamental dan Islam Liberal di Indonesia. Kontestasi dimaksud ditengarai menjadi permasalahan sosial-keagamaan (*socio-religious problem*) dalam tubuh umat Islam. Hal ini, memang, bukanlah isu baru dan menghebohkan dalam diskursus

kajian keislaman. Sepanjang rentang sejarah Islam sendiri, pertentangan antarkelompok berbeda, termasuk di dalamnya dua kelompok yang dibahas dalam kajian ini, telah ditulis dan dibahas secara komprehensif oleh para cendekiawan Muslim serta terekam dengan baik dalam karya-karya mereka.¹ Meski demikian, mendiskusikan isu kontestasi antara kelompok fundamental dan kelompok liberal, menurut hemat penulis, masih menarik. Hal ini didasarkan pada alasan, minimal, bahwa keberadaan dua kelompok berbeda kutub dan ideologi tersebut menjadikan Islam sebagai agama yang tidak kalah “seksi” dibandingkan dengan agama lain, khususnya Kristen.² Kenapa Kristen? Karena dari agama inilah istilah fundamentalisme lahir dan pada gilirannya istilah tersebut “diekspor” ke dalam agama lain, termasuk Islam.³ Azyumardi Azra menjelaskan

¹ Untuk menyebut di antara tulisan-tulisan terbaik yang ditulis oleh pakarnya, khususnya para Indonesianis, terkait tema artikel ini, sebagaimana dikutip oleh Masdar Hilmy, adalah: (a) Martin van Bruinessen, “Genealogies of Islamic Radicalism in post-Suharto Indonesia,” *South East Asia Research*, Vol. 10, No. 2 (Juli, 2002); (b) Greg Fealy, “Islamic Radicalism in Indonesia: The Faltering Revival?” *Southeast Asian Affairs* (Singapore: ISEAS, 2004). Masdar Hilmy sendiri juga merupakan seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang menaruh perhatian serius dalam tema ini. Hal ini bisa dilihat dalam tulisan-tulisannya, seperti: (a) Masdar Hilmy, “The Politics of Retaliation: The Backlash of Radical Islamists to Deradicalization Project in Indonesia”, *al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 51, No. 1 (2013 M/1434 H); (b) Masdar Hilmy, “The Configuration of Radical Islamism in Indonesia: Some Contemporary Assessments and Trajectories”, *al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 14, No. 1 (Mei, 2014). Dengan tidak mengurangi *academic respect* penulis kepada para pakar lain dalam bidang ini, penyebutan nama-nama di atas hanya sebatas eksemplar dalam artikel ini.

² Mengutip pendapat J. P. Nettl, Tholkhatul Khoir berpendapat bahwa fundamentalisme Islam menikmati “privilege” yang justru tidak dimiliki oleh agama-agama lainnya, bahkan Kristen sekalipun, yaitu ruang ekspresi baik dalam level regional maupun internasional. Lihat Tholkhatul Khoir, “Tujuh Karakter Fundamentalisme Islam”, *al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 14, No. 1 (Mei, 2014), 58.

³ Istilah “fundamentalisme” muncul pertamakali untuk merujuk kepada umat Kristen Penginjil Amerika, yang pada abad ke-sembilan belas mengusahakan, secara serius, pemahaman harfiah terhadap Bible dan menerapkannya secara murni. Pada saat yang sama gerakan ini juga menolak dengan tegas “teori evolusi” Darwin. Lebih lanjut lihat Murad W. Hofmann, *Menengok Kembali Islam Kita*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), 117. Fundamentalisme juga merupakan term yang dilabelkan kepada agamawan Protestan konservatif. Mereka membingkai konsep ajaran-ajarannya sebagai ambisi untuk melawan zaman liberal yang progresif. Ini adalah kelompok yang juga menyuarakan penolakan kepada modernitas. Lebih

dalam bukunya *Pergolakan Politik Islam* bahwa jika dilacak secara historis, gerakan fundamentalisme awal dalam Islam bisa dialamatkan kepada Khawarij. Sementara itu, gerakan fundamentalisme Islam kontemporer direpresentasikan oleh Wahabisme di Arab Saudi dan Revolusi Islam di negeri para *mullah*, Iran.⁴

Sebagai agama yang merupakan bagian dari *Abrahamic faith*, selain Yahudi dan Nasrani (Kristen), Islam memang sejak awal kelahirannya cukup menyedot atensi banyak pihak. Catatan sejarah agama ini cukup menjadi bukti sah bagaimana ia yang hanya “agama kemarin sore”, dan dibawa oleh seorang bernama Muhammad yang dituduh sebagai orang gila dan berpenyakit ayan oleh musuh-musuhnya, berani mendobrak ajaran dan tradisi dogmatik *status quo* yang selama berabad-abad, sebelum kedatangannya, berlaku. Hal ini bisa dilihat, misalnya, bahwa Islam merupakan agama yang dari awal kelahirannya mengandung dan mengajarkan nilai-nilai humanisme universal. Kehadiran awal Islam di tengah-tengah masyarakat Arab, sebuah komunitas berbasis kesukuan yang sangat kuat, saat itu benar-benar telah merubah “peta” sejarah kehidupan umat manusia, khususnya bangsa Arab itu sendiri. Sebagai contoh, “tradisi” perang antarsuku yang merupakan ciri khas masyarakat Arab dapat dihilangkan seiring diterimanya doktrin-doktrin Islam mengenai perdamaian oleh masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam yang salah satunya adalah penghargaan terhadap kehidupan manusia (*the dignity of human's life*) telah dengan baik mewarnai kehidupan masyarakat Arab, khususnya mereka yang memeluk agama ini. Terlebih sang pembawa *risalah* Islam, yaitu Nabi Muhammad, telah menjadikan dirinya contoh konkret bagi penerapan nilai-nilai luhur tersebut.

Pengutusan Muhammad sebagai *rahmah li al-'ālamīn* menegaskan bahwa Islam, sebagai agama yang dibawanya, secara otomatis juga mengemban misi universal tersebut; misi menebar kasih sayang dan perdamaian bagi seluruh makhluk penghuni dunia. Lafal *islām* sendiri bermakna “damai” dan “keselamatan.” Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam al-Qur’ān surah al-Anfāl [8]: 61 di mana dalam ayat tersebut terdapat frasa *janahū li al-salm* yang oleh mayoritas *mufassir*

lanjut lihat Steve Bruce, *Fundamentalisme*, terj. Herbhayu Noerlambang (Jakarta: Erlangga, 2000), 15.

⁴ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 1996), 107.

dimaknai dengan kecenderungan untuk saling berdamai (*al-musālamah*) dan saling berbuat baik (*al-muṣālahah*).⁵

Ayat tersebut memerintahkan kaum Muslimin untuk mengedepankan opsi perdamaian jika musuh-musuh Islam (konteks pada saat itu adalah kaum kafir Quraisy) mengajak berdamai atau dalam istilah sekarang, hal tersebut dikenal dengan “gencatan senjata”. Hal ini secara implisit bermakna bahwa kaum Muslimin dilarang melakukan serangan bersenjata terhadap musuh-musuh Islam, kecuali jika mereka (musuh-musuh itu) mengkhianati kesepakatan damai yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, ayat tersebut secara implisit juga mengandung ajaran bagi kaum Muslimin untuk tidak mengkhianati kesepakatan damai yang dicapai dengan musuh-musuh mereka.

Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme yang diantaranya adalah perdamaian antarumat manusia. Sebaliknya, Islam melarang, dan bahkan mengutuk, tindakan-tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Meskipun demikian, fakta yang ada menunjukkan bahwa kekerasan yang mengatasnamakan agama masih sering terjadi. Dalam kasus Indonesia, misalnya, kekerasan “berjubah” agama bahkan cenderung mengalami peningkatan terutama pasca runtuhnya Orde Baru dan dimulainya Era Reformasi.

Kekerasan bernuansa agama tersebut “diwakili” oleh kelompok yang, oleh sementara pengamat, dinamakan dengan kelompok fundamentalis (dan ada juga yang menyebut dengan term “islamis”, “ekstremis”, “radikalis”, dan “militan”). Fakta bahwa umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia ikut berpengaruh pada kemunculan banyak kelompok fundamentalis di kalangan komunitas Muslim. Meskipun demikian, keberadaan kelompok Muslim fundamentalis tersebut juga disertai dengan kehadiran kelompok lain yang secara ideologis berlawanan dengan kelompok pertama. Kelompok dimaksud adalah Muslim liberal.

Kelompok yang disebut terakhir merupakan kelompok yang sering bertentangan (dan dipertentangkan) dengan kelompok pertama. Kehadiran dua kelompok yang secara ideologis saling berlawanan tersebut pada gilirannya memunculkan kontestasi di antara keduanya. Kontestasi yang terjadi antara kedua kelompok tersebut terjadi hampir di semua aspek keagamaan, terutama dalam hal ideologis terkait

⁵ Khālid ‘Abd al-Raḥmān al-‘Ak, *Ṣafwat al-Bayān li Ma‘ānī al-Qur’an al-Karīm* (Beirut: Dār al-Bashā’ir, 1994), 184.

pemahaman terhadap teks-teks dalam kitab suci, yaitu al-Qur'ān. Hal tersebut telah menjadi problem internal umat Islam, termasuk di Indonesia.

Kontestasi antara dua kelompok tersebut, menurut hemat penulis, bisa dikategorikan sebagai masalah sosial (*social problem*) sekaligus masalah keagamaan (*religious problem*). Dengan demikian, hal tersebut bisa dilihat dari perspektif sosial sekaligus agama. Dikatakan sebagai problem sosial dikarenakan rivalitas antara kedua kelompok tersebut merupakan bagian dinamika dalam kehidupan sosial secara umum. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh para sosiolog dengan teori konflik mereka. Secara tegas teori konflik berpendapat bahwa masyarakat yang “sehat” selalu ditandai dengan adanya konflik yang terjadi di antara anggota-anggotanya. Dengan adanya konflik, sebuah masyarakat akan mengalami dinamisasi untuk mengantarkan mereka ke arah yang lebih maju.⁶ Konflik semacam inilah yang disebut oleh para proponent teori konflik sebagai “konflik positif”. Hal ini karena konflik yang menciptakan “daya tahan” sosial semacam itu menunjukkan bahwa ia terkelola dengan baik. Sebaliknya, konflik menjadi “negatif” apabila ia tidak terkelola dengan baik. Konflik semacam ini pada gilirannya hanya bermuara pada satu titik, yaitu erupsi dan disrupsi sosial yang biasanya selalu diikuti dengan aksi-aksi destruktif dan kekerasan terbuka (*open violence*).

Selanjutnya, kontestasi antara dua kelompok tersebut dilihat sebagai problem keagamaan dikarenakan kontestasi keduanya sama-sama berpijak di atas lokus teks suci, terutama al-Qur'ān. Meski keduanya memiliki pijakan yang sama, akan tetapi masing-masing kelompok memiliki interpretasi yang berbeda bahkan cenderung secara tajam berlawanan. Hal tersebut, tidak lain, disebabkan oleh perbedaan sudut pandang yang mereka gunakan dalam membaca dan memahami teks-teks keagamaan. Konteks kontestasi itulah yang akan coba dielaborasi dalam tulisan ini.

Fundamentalisme *vis-à-vis* Liberalisme dalam Pemikiran Keagamaan

Fundamentalisme agama dengan turunannya, yaitu ekstremisme agama, yang muncul dalam dekade belakangan ini sebenarnya tidak bisa hanya diidentikkan dan diasosiasikan dengan Islam dan umat

⁶ Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi: Kritik terhadap Teori Sosiologi Kontemporer* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), 157.

Islam. Fakta yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti di Norwegia pada tahun 2012 yang lalu sebagai contoh, yang dilakukan oleh Anders Behring Breivik, membuktikan bahwa paham dan gerakan ekstremis dapat terjadi pada semua komunitas umat beragama, karena berbagai latar belakang dan ragam sebab yang memicunya.⁷ Sebagai sebuah paham (*isme*) sekaligus gerakan identitas, fundamentalisme juga berlaku—atau lebih tepatnya “diberlakukan”—ke dalam, hampir, semua agama yang ada di dunia.⁸

Dengan demikian, fundamentalisme⁹ agama bukan merupakan hal unik yang hanya terdapat dalam agama Islam saja. Riaz Hassan, mengutip Martin E. Marty dan R. Scott Appleby, mengatakan bahwa fundamentalisme agama telah muncul dalam semua agama besar dunia sejak lebih dari tiga puluh tahun terakhir. Bahkan ia telah menjadi isu sentral dan berpengaruh dalam diskursus global.¹⁰ Dengan kata lain, mengasosiasikan fundamentalisme dan ekstremisme agama hanya kepada suatu agama tertentu merupakan sikap dan tindakan gegabah dan sama sekali tidak berdasar pada fakta-fakta empiris. Menurut Sri Yunanto, doktrin tentang jihad, misalnya, secara internal

⁷ <http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2011/08/01/15678/> gerakan-ekstremisme-terjadi-pada-semua-komunitas-umat-beragama/. Diakses pada 15 Januari 2012.

⁸ Silvia Hanani, *Menggali Interelasi Sosiologi dan Agama* (Bandung: Humaniora, 2011), 126.

⁹ Dalam hal penggunaan istilah “ekstremisme” dan “fundamentalisme”, penulis mengikuti pendapat Appleby. Ia menulis dalam bukunya *The Ambivalence of the Sacred* bahwa fundamentalisme agama merupakan sumber bagi kemunculan ekstremisme agama. Dalam tulisannya, Appleby menjelaskan definisi kedua term tersebut serta beberapa karakteristik ideologis dan organisasional keduanya. Menurut hemat penulis, kedua istilah tersebut dapat digunakan untuk merujuk pada hal yang sama, yaitu “kekerasan yang bernuansa dan mengatasnamakan agama”. Artinya, dalam artikel ini, di satu tempat penulis menggunakan istilah “ekstrem, ekstremis, ekstremisme” dan di tempat lain “fundamental, fundamentalis, fundamentalisme” dengan makna yang sama. Lihat R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred* (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2000), 85-89.

Meskipun demikian menurut penulis, dalam hal ini, sebaiknya kita tidak terjebak dalam perdebatan penggunaan istilah. Sebab istilah apapun yang kita gunakan pada hakikatnya bermakna sama, yaitu kekerasan berbaju agama. Achmad Munjid, misalnya, justru menggunakan istilah “militan” yang juga bermakna “fundamentalis” dan “radikal”. Lebih lanjut lihat Achmad Munjid, “Militant and Liberal Islam: The Unwanted Twin Children of Modernization—an Indonesian Experience”, *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 3, No. 1 (Juni, 2009), 35-65.

¹⁰ Riaz Hassan, *Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim*, terj. Jajang Jahroni (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 12.

juga terdapat dalam ajaran agama selain Islam. Doktrin ini, pada gilirannya, memberi ruang bagi adanya interpretasi di mana salah satunya adalah interpretasi atas tindakan kekerasan (ekstremisme).¹¹

Ekstremisme sebagai pengejawantahan sikap fundamentalisme, sebagaimana dinyatakan di atas, dengan demikian, ditemukan hampir dalam setiap agama baik agama “langit” maupun agama “bumi”. Meyakini doktrin kebenaran agamanya secara berlebihan adalah salah satu sikap paling menonjol yang ditunjukkan oleh kalangan fundamentalis. Sikap semacam ini pada gilirannya menyebabkan munculnya sikap monopoli dan klaim kebenaran (*truth claim*) yang membabi-buta. Jika dilihat dari aspek psikologis, kelompok fundamentalis memiliki egoisme dan keyakinan yang sangat kuat terhadap doktrin-doktrin keagamaan yang mereka anut. Hal ini memunculkan hasrat dalam diri mereka untuk membangun dan membentuk opini absolut atas kebenaran yang diyakininya tersebut.¹² Appleby secara eksplisit menjelaskan bahwa fundamentalisme merupakan sumber bagi munculnya ekstremisme keagamaan. Dia menjelaskan bahwa pola militansi fundamentalis berawal dari sebuah reaksi terhadap penetrasi terhadap komunitas keagamaan yang dilakukan oleh kelompok sekuler maupun kelompok keagamaan luar.¹³ Dengan kata lain, gerakan ekstremis muncul sebagai reaksi terhadap hegemoni dan ancaman yang dilakukan oleh, dan berasal dari, kelompok dan ideologi luar. Artinya, faktor eksternal dalam hal ini memainkan peranan penting bagi kemunculan kelompok-kelompok ekstremis dalam suatu agama.

Selain faktor eksternal, terdapat pula aspek internal sebagai *triggering factor* bagi lahirnya kelompok ekstremis. Pengamat berpendapat bahwa salah satu penyebab ekstremisme agama adalah *false understanding* (pemahaman yang salah) dan tidak komprehensif terhadap doktrin-doktrin agama, di samping kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan dan berbagai disparitas sosial lainnya. Para tokoh agama, bahkan, menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang disebut terakhir merupakan faktor yang sangat rentan bagi penyebab terjadinya

¹¹ Sri Yunanto, *Islam Moderat vs Islam Radikal* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), 91.

¹² Bertrand Russell, *Bertuhan tanpa Agama*, terj. Imam Baehaqi (Yogyakarta: Resist Book, 2008), 132.

¹³ Appleby, *The Ambivalence of the Sacred*, 87.

ekstremisme bernuansa agama.¹⁴ Pendapat tersebut cukup masuk akal dikarenakan kebodohan merupakan akar kesengsaraan dan keburukan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Seseorang yang mengetahui dan memahami ajaran-ajaran agamanya dengan baik dan benar (baca, orang berilmu) akan memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru kontra-produktif dengan ajaran-ajaran agamanya, termasuk melakukan tindakan-tindakan destruktif.

Jika dilacak dalam aspek kebahasaan, kata *fundamental* sendiri berarti “secara mendasar atau sampai kepada hal yang prinsip, usaha yang amat keras untuk menuntut perubahan, dan bisa pula berarti maju dalam berpikir atau bertindak”.¹⁵ Dalam perkembangan selanjutnya, *term* “fundamental” menjadi istilah yang populer. Istilah ini, bahkan, diasosiasikan dengan *ism* (paham) serta gerakan politik (*political movement*).¹⁶ Hal tersebut mengacu pada beberapa kasus, sebut saja misalnya sejumlah gerakan yang bersifat revolusioner yang terjadi di beberapa negara Islam, seperti revolusi Islam Iran, dan perilaku anti-Amerika oleh mantan Presiden Libya Muammar Kadhafi serta mantan Presiden Irak Saddam Hussein.

Kata *ekstremisme* sendiri berarti “paham atau aliran yang ekstremis dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam aliran politik”.¹⁷ Dalam definisi yang senada, *ekstremisme* ialah “suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, pengebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya bila perlu menggunakan cara-cara kekerasan; menginginkan

¹⁴ Hal tersebut diungkapkan dalam Diskusi Panel bertajuk “Membangun Ukhuwah di Tengah Pluralitas Pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia” pada 30/7/2011 di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Lihat <http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2011/08/01/15678/gerakan-ekstremisme-terjadi-pada-semua-komunitas-umat-beragama/>. Diakses pada 15 Januari 2012.

¹⁵ <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. Diakses pada 15 Januari 2012.

¹⁶ Fundamentalisme dalam kategori ini disebut juga “fundamentalisme aktivis-politis”. Ada jenis fundamentalisme lain yaitu “fundamentalisme spiritualis-rasionalis”. Jenis pertama mengacu pada kelompok yang memperjuangkan Islam sebagai entitas politik dan tidak menekankan pembaharuan pemikiran agama yang autentik. Sementara itu tipologi kedua merujuk pada kelompok yang bersifat rasional dan spiritual, dalam arti memahami ajaran agama berdasarkan semangat dan konteksnya. Lebih lanjut lihat Khoir, “Tujuh Karakter Fundamentalisme Islam”, 55. Terlepas dari adanya tipologi semacam itu, penulis membatasi pengertian fundamentalisme sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

¹⁷ <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. Diakses pada 15 Januari 2012.

adanya perubahan total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat”. Di Inggris, ekstremisme merupakan usaha untuk melakukan perubahan terhadap parlemen.¹⁸

Sementara itu, liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas. Liberalisme menolak adanya pembatasan dan pengkekangan berpikir dan bertindak, khususnya yang dilakukan oleh pemerintah dan agama.¹⁹

Fundamentalisme *vis-à-vis* Liberalisme dalam Islam: Kontestasi Tak Berujung?

Hal yang mungkin cukup “menggelingkan” bagi sementara kita adalah bahwa fundamentalisme, sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan istilah yang justru tidak berasal dari Islam.²⁰ Jika kemudian term ini melekat pada sekelompok umat Islam, maka sesungguhnya itu merupakan “label” yang diatributkan oleh orang-orang di luar Islam, khususnya Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Hal ini karena dalam Islam sendiri istilah fundamentalisme tidak dikenal sebelumnya. Menurut Yusuf Qardhawi, fundamentalisme Islam sebenarnya merupakan term yang secara *massive* dipropagandakan oleh Barat, melalui media-medianya dan hal tersebut di luar kehendak umat Islam sendiri. Melalui propaganda yang *massive* itulah kemudian hampir semua pihak “mengamini” bahwa fundamentalisme Islam adalah istilah yang benar adanya.²¹

Fakta bahwa perbuatan yang “memenuhi syarat” untuk disebut sebagai “perbuatan ekstremis” dilakukan oleh sebagian kelompok [dan tentu saja tidak bijaksana apabila dikatakan sebagai representasi Islam] umat Islam, terutama para penguasa di beberapa negara Islam seperti contoh di atas, adalah sesuatu yang memang tidak bisa dinafikan serta fakta yang tidak bisa ditolak. Akan tetapi penting untuk digarisbawahi bahwa para pelaku tindakan tersebut tetap saja tidak menyebut diri mereka sebagai seorang ekstremis (fundamentalis).

¹⁸ “Ekstremisme”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Ekstremisme>. Diakses pada 15 Januari 2012.

¹⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme>. Diakses pada 16 Januari 2012.

²⁰ Lihat catatan kaki nomor 2.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Masa Depan Fundamentalisme Islam*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), 15.

Berdasarkan gerakan-gerakan yang terjadi di sejumlah negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam tersebut, dunia Barat (Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya) kemudian memberikan *stigma* bahwa Islam merupakan agama penganjur ekstremisme. Mereka berpandangan bahwa Islam identik dengan agama kekerasan serta intoleransi dalam melakukan setiap perubahan. Dunia Barat bahkan tidak segan untuk memberi label bahwa Islam adalah agama yang tidak humanis hanya berdasarkan pada aksi kekerasan yang dilakukan oleh segelintir orang Islam.²² Pengeboman gedung WTC dan Pentagon di Amerika Serikat pada 11 September 2001, yang pelakunya dituduhkan kepada kelompok Al-Qaeda dan Taliban, seolah memberikan justifikasi bahwa ekstremisme atas nama agama hanya ada dalam Islam. Padahal jika dilihat secara objektif dalam lintasan sejarah agama-agama lain, di sebagian negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim, gerakan ekstremis juga terjadi. Sebagaimana contoh yang telah disebutkan di awal sub-bab ini.

Bernard Lewis menyatakan bahwa mayoritas Muslim, memang, bukan fundamentalis dan fundamentalis tidak mesti identik dengan teroris, hanya saja—karena perilaku sekelompok minoritas—hampir kebanyakan dari tindakan teror yang terjadi belakangan ini identik, dan diidentikkan, dengan Islam dan kaum Muslimin. Hal ini telah memicu protes dari sebagian besar umat Islam yang sama sekali justru menentang gerakan teror tersebut. Pertanyaannya adalah kenapa, misalnya, teror yang dilakukan oleh teroris *Irish* dan *Basque* tidak disebut sebagai teror yang dilakukan oleh penganut Kritis padahal mereka adalah orang Kristen?²³ Lalu, kenapa teror dan aksi kekerasan atas nama agama harus selalu identik atau diidentikkan dengan Islam dan Muslim? Dalam konteks ini, pertanyaan tersebut menjadi penting untuk diajukan.

Dalam konteks sejarah Indonesia sendiri gerakan ekstremis bernuansa agama (fundamentalisme agama) pernah muncul di awal-awal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di antara gerakan tersebut, ada yang menamakan dirinya dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Gerakan tersebut terjadi cukup *massive* di beberapa daerah di Indonesia. Di Jawa Barat, DI/TII dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, sebagai penggagas awal bagi gerakan ini. Selanjutnya, Abdul Kahar Muzakar memimpin DI/TII di

²² Hanani, *Menggali Interelasi*, 128.

²³ Bernard Lewis, *The Crisis of Islam* (New York: The Modern Library, 2003), 137.

Sulawesi Selatan, sementara di Aceh gerakan ini dipimpin oleh Daud Beureueh. Gerakan tersebut bersifat ekstremis yang menginginkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Tidak berhenti di situ, pada konteks Indonesia sekarang ini gerakan ekstremis yang menginginkan berdirinya negara Islam atau yang lazim dikenal dengan istilah “*khilāfah islāmīyah*” juga disuarakan oleh sekelompok umat Islam yang—sampai dengan batas tertentu—dapat dikategorikan sebagai kelompok ekstremis. Kelompok dimaksud adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bedanya, kelompok yang disebut terakhir ini menjalankan “agenda” negara Islam mereka melalui cara-cara yang elegan dan jauh dari kesan dan nuansa kekerasan.

Gerakan ekstremis bernuansa agama, seperti telah disebutkan di atas, muncul karena adanya faktor-faktor pendorong, seperti kesenjangan sosial dan ketidakadilan serta perbuatan sewenang-wenang.²⁴ Timbulnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM), misalnya, dan terpisahnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)—meskipun contoh yang disebut terakhir sarat dengan nuansa politik dan tidak secara langsung terkait dengan sentimen keagamaan—merupakan contoh konkret gerakan ekstremis yang dipicu oleh faktor-faktor tersebut; di samping hal ini juga merupakan salah satu bentuk dari titik kulminasi persoalan bangsa yang sangat akut. Setali tiga uang dengan kemunculan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang dinyatakan terlarang di Indonesia dan telah dibubarkan oleh pemerintah, yang – jika dicermati – juga merupakan respons terhadap kebijakan internasional, yang dalam hal ini terwakili oleh Amerika Serikat, yang sangat sewenang-wenang dan diskriminatif terutama terhadap umat Islam. Standar ganda (*double standard*) yang diberlakukan oleh AS dan sekutunya dalam menyikapi dan menangani isu-isu global yang di dalamnya terdapat kepentingan umat Islam sebagaimana isu Palestina, misalnya, juga ditengarai sebagai pemicu bagi reaksi yang ditunjukkan oleh kelompok-kelompok fundamentalis yang ada dalam Islam.

Kemunculan kelompok-kelompok ekstremis dalam Islam sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, seperti diuraikan di atas. Penafsiran

²⁴ Khamami Zada menjelaskan bahwa sikap represif rezim penguasa terhadap kelompok-kelompok Islam, dalam kasus Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, merupakan faktor yang ikut andil dalam membangkitkan radikalisme Islam. Hal yang sama juga berlaku bagi hegemoni Barat. Lihat Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002), 92.

yang *rigid* dan, sampai batas tertentu, serampangan terhadap teks-teks suci agama menjadi salah satu faktor penting pemicu terjadinya gerakan ekstremis-ekstrim benuansa agama.²⁵ Sebagai contoh, dan ini sangat klasik, dalam agama Islam diajarkan doktrin *jibād fi sabil Allāh* (berjuang di jalan Allah) dengan harta, tenaga, dan bahkan jika diperlukan nyawa. Dalam perkembangannya, kata *jibād* tersebut diinterpretasi secara berbeda dan bermacam-macam. Kaitannya dengan gerakan ekstremis, kata *jibād* hanya dipahami dengan berjuang (perang) secara fisik, yaitu memanggul senjata dan mengorbankan nyawa. Masdar Hilmy menjelaskan bahwa, menurut kelompok ini, ayat-ayat al-Qurʾān yang menerangkan tentang “peaceful jihad” (jihad dengan cara-cara damai) telah di-*naskh* (dihapus) oleh ayat-ayat yang mengutamakan “offensive jihad” (jihad secara fisik dengan mengangkat senjata dan membasmi musuh-musuh Islam).²⁶ Penafsiran yang kaku hanya dalam satu aspek inilah yang kemudian menimbulkan gerakan ekstremis yang cenderung melakukan tindakan-tindakan kekerasan fisik. *Jibād* dalam penafsirannya yang luas, seperti perang melawan kebodohan iman dan intelektual, kemiskinan, dan keterbelakangan kurang (bahkan tidak) mendapatkan perhatian dari kelompok-kelompok ekstremis.²⁷ Dengan kata lain, bagi kelompok ini hanya dengan melakukan konfrontasi fisik menggunakan senjatalah yang dinilai sebagai jihad di jalan Tuhan. Penafsiran satu sisi semacam ini ditolak oleh kaum liberalis. Bagi kelompok yang disebut terakhir, jihad tidak terbatas hanya pada memerangi musuh fisik dengan mengangkat senjata, melainkan harus dimaknai secara luas seperti diuraikan di atas.

²⁵ Yang penulis maksud dengan “serampangan” adalah kecenderungan kelompok radikal dalam mengabaikan konteks serta aspek historisitas yang melatarbelakangi diturunkannya suatu teks (baca: wahyu). Hal ini juga berlaku bagi kelompok liberalis.

²⁶ Hilmy, “The Configuration of Radical Islamism”, 6. Jihad bahkan oleh kelompok Muslim ekstremis dimaknai dengan “perang suci” secara fisik. Lebih lanjut lihat Hilmy, “The Politics of Retaliation”, 138.

²⁷ Pemaknaan kata *jibād* dalam arti perang secara fisik—yang dianut oleh kelompok radikal—jika didasarkan pada rekam sejarah penyebaran agama Islam, mulai dari masa Nabi Muhammad hingga masa *al-Khulafāʾ al-Rāshidīn* dan pasca-khalifah, bisa saja diterima. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa ekspansi wilayah pada masa-masa awal Islam memang, tidak dapat dipungkiri, sering diwarnai dengan peperangan fisik. Akan tetapi, sekali lagi, perlu digarisbawahi bahwa penafsiran semacam itu kurang—untuk tidak mengatakan tidak—relevan lagi apabila diterapkan dalam konstelasi saat ini, kecuali jika umat dan agama Islam diserang secara fisik oleh musuh dan hanya untuk tujuan membela diri.

Dalam diskursus agama, sikap seperti disebutkan di ataslah yang kemudian menyulut beragam kerusuhan dan tidak jarang berujung pada kekerasan terbuka. Ekstremisme muncul sebagai bentuk akumulasi dari menumpuknya permasalahan hidup sehingga mengakibatkan individu dan/atau golongan tidak memiliki kemampuan yang adekuat dalam menangkap, mencerpap dan memahami pesan-pesan agamanya secara benar dan komprehensif. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap agama pasti menekankan doktrin kepada pemeluknya bahwa ajarannya adalah ajaran yang paling sempurna dan paling benar serta sebagai satu-satu jalan yang bisa mengantarkan manusia kepada keselamatan (*salvation*). Akan tetapi, jika doktrin seperti itu dipahami secara membabi-butu tentu akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya. Hal tersebut kemudian diperparah oleh adanya perintah agama yang menyuruh untuk menyebarkan agama (misalnya, “dakwah” dalam Agama Islam; dan “zending” dalam Agama Kristen). Di lapangan, kepentingan tersebut kemudian bertemu, saling bergesekan, dan pada akhirnya menimbulkan konflik yang tidak terhindarkan.²⁸ Fakta memang menunjukkan bahwa, sampai saat ini, doktrin tentang “kebenaran absolut” (*absolute truth*) masih mendominasi pemikiran mayoritas pemeluk agama bahwa hanya agama merekalah yang berhak memonopoli kebenaran. Artinya, orang lain yang berada di luar agama mereka tidak berhak dan tidak akan memperoleh keselamatan. *Mindset* semacam itu sepertinya telah kuat mengakar pada diri setiap pemeluk agama; apapun agamanya.

Dengan demikian, bagaimana doktrin kebenaran tunggal (*truth claim*) dan keselamatan (*salvation*) tersebut diyakini oleh tiap-tiap pemeluk agama sebagai ajaran absolut serta aplikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang plural, heterogen dan multikultur, seperti Indonesia ini, menjadi hal yang penting untuk terus-menerus “diawasi”, terutama oleh para pemuka agama-agama. Adalah benar bahwa setiap individu pemeluk agama perlu meyakini jika ajaran agamanya adalah yang paling benar, tapi yang penting untuk digarisbawahi adalah bahwa klaim kebenaran yang ada pada agama yang dipeluk oleh seseorang tidak lantas memberikan justifikasi bagi dirinya untuk menyalahkan keyakinan orang lain, atau bahkan memerangi keyakinan tersebut. Lebih lanjut, kebenaran tersebut tidak

²⁸ Nurrochman, “Teologi Humanis: Upaya Mengikis Ekstremisme Islam”, <http://journalsosiologiagama.blogspot.com/>. Diakses pada 20 Januari 2012.

boleh dipaksakan kepada orang lain baik dengan cara halus maupun kekerasan. Hal tersebut didasarkan pula pada doktrin universal agama bahwa tidak ada satupun agama yang memberikan justifikasi dan mengajarkan umatnya untuk melakukan tindak kekerasan, perusakan, pembunuhan dan berbagai tindakan lain yang bertentangan dengan nilai-nilai humanisme.

Sebenarnya, gerakan ekstremis bernuansa agama, dan ekstremisme sendiri, tidak hanya sebatas sebagai gerakan protes terhadap kondisi sosial sebuah bangsa, akan tetapi ia juga merupakan hasil (produk) pemikiran. Ekstremisme, dalam konteks ini sebenarnya, juga merupakan reaksi dan wacana tanding (*counter discourse*) atas meluasnya pemikiran liberalisme terutama pascaperang dingin. Benjamin Barber menyatakan bahwa *jihad* (*martyrdom*) merupakan bagian doktrin dalam kelompok fundamentalis, yang bisa ditemukan hampir dalam semua agama di dunia, sebagai reaksi dan penentangan terhadap modernitas yang salah satunya dicirikan dengan liberalisme.²⁹ Artinya, kelompok ekstremis menganggap bahwa kelompok liberal—beserta semua produk pemikirannya—merupakan musuh yang harus dilawan dan diperangi. Hal ini dikarenakan liberalisme merupakan anak modernitas yang, menurut kelompok ekstremis, membahayakan tidak saja eksistensi mereka namun juga eksistensi agama beserta ajaran-ajarannya.

Masalah yang dialami oleh agama, dengan demikian, tidak hanya terbatas pada keberadaan kelompok ekstremis. Akan tetapi, eksistensi kelompok liberal dengan liberalismenya-pun menjadi bagian problem tersendiri dalam agama. Liberalisme sendiri—seperti telah dijelaskan di atas—merupakan sebuah paham, selain ia juga merupakan pandangan filsafat dan tradisi politik. Liberalisme menyandarkan pemahamannya pada sebuah doktrin bahwa kebebasan merupakan nilai yang utama; dan nilai inilah yang diusung serta diperjuangkan oleh paham ini. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas. Masyarakat bebas yang diinginkan oleh liberalisme adalah masyarakat yang ditandai dengan adanya kebebasan berpikir bagi sertiap individu. Liberalisme, dengan demikian, menolak adanya pembatasan dan pengekangan berpikir dan bertindak, khususnya yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi agama.³⁰ Dengan kata lain, bagi kelompok ini, agama dan pemerintah tidak

²⁹ Benjamin R. Barber, *Jihad vs. McWorld* (New York: Ballantine Books, 1995), 205.

³⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme>.

memiliki wewenang untuk mengekang kebebasan berekspresi dalam aspek apapun terutama dalam ranah kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat. Bagi penganut paham liberal, kebebasan dalam setiap lini kehidupan manusia adalah hak yang melekat sejak setiap individu manusia dilahirkan. Dengan demikian, tidak ada pihak manapun, termasuk institusi agama, yang berhak merampas kebebasan tersebut.

Ada tiga hal yang mendasar dari liberalisme yaitu kehidupan (*life*), kebebasan (*liberty*) dan hak milik (*property*). Salah satu nilai pokok yang bersumber dari tiga nilai dasar liberalisme tersebut adalah bahwa paham ini tidak menerima ajaran dogmatisme (*refuse dogmatism*); termasuk di dalamnya dogma keagamaan. Hal ini disebabkan karena pandangan filsafat dari John Locke (1632–1704) yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu didasarkan pada pengalaman. Oleh karenanya, dalam pandangan ini, kebenaran itu berubah (baca, tidak absolut).³¹ Dengan demikian, berdasarkan nilai ini dipahami bahwa liberalisme tidak bisa menerima ajaran-ajaran agama yang justru bersifat dogmatis. Hal ini tentu sangat berlawanan dengan ekstremisme yang cenderung “menelan mentah-mentah” doktrin keagamaan.

Dalam *Wikipedia* dijelaskan bahwa ada dua macam liberalisme, yaitu Liberalisme Klasik dan Liberalisme Modern. Liberalisme Klasik timbul pada awal abad ke-16. Sedangkan Liberalisme Modern mulai muncul sejak abad ke-20. Namun, bukan berarti pasca kemunculan Liberalisme Modern, Liberalisme Klasik hilang begitu saja atau tergantikan oleh Liberalisme Modern, karena hingga kini, nilai-nilai dari Liberalisme Klasik masih ada dan dianut. Liberalisme Modern tidak mengubah hal-hal yang mendasar dalam Liberalisme Klasik. Dengan kata lain, nilai inti (*core values*) dari Liberalisme Klasik tidak berubah, melainkan hanya ada penambahan saja dalam *versi* yang baru. Dalam Liberalisme Klasik, keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah diagungkan. Setiap individu memiliki kebebasan berpikir masing-masing yang akan menghasilkan paham baru. Meskipun begitu, bukan berarti kebebasan yang dimiliki individu itu adalah kebebasan yang mutlak, melainkan kebebasan itu adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan.³² Namun, sampai batas tertentu, kaum liberalis Muslim, terutama di Indonesia, saat ini sepertinya telah

³¹ Ibid.

³² Ibid.

melupakan dan menafikan “tanggung jawab” yang seharusnya mereka lakukan setiap kali mereka memproduksi pemikiran. Hal ini sebagaimana akan penulis ilustrasikan di bawah.

Setali tiga uang dengan fundamentalisme, liberalisme pada awalnya juga sangat erat terkait dengan gereja, tepatnya sejarah Gerakan Reformasi Gereja. Gerakan ini pada awalnya hanyalah serangkaian protes kaum bangsawan dan penguasa Jerman terhadap kekuasaan imperium Katolik Roma. Pada saat itu keberadaan agama sangat mengekang kebebasan individu. Dalam hal ini tidak ada kebebasan, yang ada hanyalah dogma-dogma agama serta dominasi gereja. Pada perkembangan berikutnya, dominasi gereja dirasa sangat menyimpang dari otoritasnya semula. Hal tersebut menyebabkan individu menjadi tidak berkembang, kerena mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Gereja bahkan dalam mencari penemuan ilmu pengetahuan sekalipun. Kemudian timbullah kritik dari beberapa pihak, misalnya kritik oleh Marthin Luther. Kritik Luther mencakup adanya komersialisasi agama dan ketergantungan umat terhadap para pemuka agama sehingga menyebabkan manusia menjadi tidak berkembang yang berdampak luas. Kritik tersebut pada akhirnya terakumulasi menjadi sebuah gerakan sehingga pada puncaknya timbul Reformasi Gereja pada 1517 yang menyulut kebebasan bagi individu.³³ Dengan demikian, secara historis baik fundamentalisme maupun liberalisme adalah sama-sama “anak” yang dilahirkan oleh gereja (Kristen) yang kemudian “diekspor” ke dalam agama-agama lain, termasuk Islam.

Dalam konteks Indonesia, liberalisme masuk hampir bersamaan dengan melemahnya kekuatan politik identitas kelompok ekstremis yang menghendaki berdirinya negara Islam.³⁴ Oleh sebagian kalangan terutama kelompok akademisi muda Indonesia, liberalisme sangat diminati. Hal ini tidak terkecuali kalangan muda yang berasal dari kelompok tradisionalis (baca, pesantren). Meski secara lisan mereka menentang paham ini, akan tetapi arus deras pemikiran liberal menyusup hingga ke kantong-kantong pesantren. Kenapa liberalisme diminati? Hal ini karena, dalam pandangan peminatnya, ia sepiantas tidak jauh berbeda dari pluralisme dan inklusivisme (oleh kelompok

³³ Ibid.

³⁴ Hal tersebut terjadi terutama ketika rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto berkuasa di mana “doktrin” mengenai azas tunggal, yaitu Pancasila, harus diikuti oleh masyarakat Indonesia, terutama berbagai organisasi baik politik maupun massa.

fundamentalis, dua term yang disebut terakhir dianggap sebagai “anak kandung” pemikiran liberal) yang juga marak berkembang di Indonesia pada dekade 1960-an dengan gagasan pembaruan yang diusung oleh kelompok, yang disebut dan/atau menamakan dirinya, modernis.³⁵

Karena mendapat dukungan dari berbagai pihak, eksistensi kelompok Islam liberal jauh lebih berjaya dibandingkan dengan kelompok Islam identitas, khususnya kelompok fundamentalis. Selain itu, kelompok Islam liberal juga tidak terlalu mempersoalkan bentuk. Namun seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan dimulainya Era Reformasi kelompok Islam identitas mendapatkan kembali momentumnya. Momentum paling penting bagi kelompok ini adalah pascadihapusnya aturan pemerintah yang mengharuskan setiap organisasi masa (ormas) dan organisasi sosial politik (orsospol) di Indonesia menganut asas tunggal yaitu Pancasila. Kelompok ini menganggap bahwa kewajiban semacam itu merupakan bentuk hegemoni dan penindasan atas mereka.³⁶ Di sinilah pertentangan antara kelompok Islam liberal dan kelompok Islam ekstremis terjadi (kembali). Dukungan negara luar, khususnya Amerika Serikat dan Eropa, terhadap kelompok Islam liberal serta gaya sewenang-wenangnya AS dan sekutu-sekutunya dalam ekspansi militer terhadap negara-negara Islam semisal Afghanistan, Irak, dan Libya disertai sikap ambigu AS terhadap isu Palestina-Israel turut memperparah perseteruan antara kedua kelompok tersebut.

Dalam konteks Islam Indonesia, kelompok Islam liberal direpresentasikan diantaranya oleh Jaringan Islam Liberal (JIL). Jika kelompok Islam ekstremis memahami teks-teks keagamaan secara “hitam-putih” atau memahami teks dalam satu sisi, maka, sebaliknya, kelompok Islam liberal—dengan hermeneutikanya—cenderung pada penafsiran “bebas” yang, tidak jarang, menentang pakem penafsiran yang telah digariskan oleh ulama-ulama tafsir terdahulu (atau dalam bahasa kelompok ekstremis disebut *‘ulama’ al-salaf al-ṣāliḥ*). Hal ini, misalnya, bisa dilihat dalam produk-produk pemikiran yang dihasilkan oleh kelompok Islam liberal tersebut. Salah satu produk pemikiran kelompok Islam liberal di Indonesia adalah pendapat mereka tentang

³⁵ Abdul Azis, ”Ekstremisme Sulit Dibendung Tanpa Keadilan”, <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/73543/ekstremisme-sulit-dibendung-tanpa-keadilan>. Diakses pada 16 Januari 2012.

³⁶ Ibid.

bolehnya perkawinan dua orang berbeda keyakinan atau perkawinan lintas agama. Hal ini bahkan secara tegas diuraikan dalam buku berjudul *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*.³⁷

Dalam konteks ajaran fiqih “mainstream” [fiqih tradisional yang bersandar pada Mazhab Empat] yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, bahkan di dunia, pemikiran tentang isu pernikahan lintas agama ala Islam liberal di atas tentu menjadi polemik. Jika polemik tersebut terjadi di kalangan akademisi-cendekia, yang memiliki kemampuan bernalar kritis, tentu tidak menjadi masalah. Akan tetapi jika polemik tersebut terjadi di kalangan masyarakat awam, tentu berpotensi menyebabkan kekacauan dan kebingungan. Ini merupakan produk pemikiran yang secara tegas ditentang oleh kalangan Islam fundamentalis. Bagi kelompok yang disebut terakhir, pernikahan dua orang berbeda agama atau keyakinan—khususnya perkawinan antara Muslim dan non-Muslim—adalah hal yang dilarang.³⁸

Membayangkan bahwa kelompok Islam fundamentalis dan liberalis bisa berdamai sepertinya merupakan ilusi belaka. Tanpa bermaksud menyuarakan pesimisme akan hal ini, tapi *term* “kontestasi” yang penulis gunakan dalam artikel ini sepertinya bisa menjadi justifikasi. Hal ini karena kontestasi antara dua kelompok tersebut bukanlah kontestasi biasa, melainkan kontestasi yang berada dalam ranah ideologi dan kepentingan global di balik itu. Perbedaan perspektif, sekaligus perbedaan pisau analisa, yang digunakan oleh masing-masing kelompok dalam memahami pesan-pesan teks suci merupakan hal yang sulit dicarikan titik temunya.

Justifikasi lainnya adalah bahwa kelompok Muslim fundamentalis (Masdar Hilmy menyebutnya dengan istilah “Islam radikal”) menyebut kaum liberal dengan istilah “musuh dekat”.³⁹ Layaknya dua orang atau kelompok yang bermusuhan, masing-masing pasti memiliki keinginan untuk menghabisi lawannya. Hal ini diilustrasikan oleh Masdar Hilmy dalam tulisannya bagaimana terdapat anggota kelompok Islam fundamentalis yang sangat berambisi untuk

³⁷ Lihat Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2005), Cet. VII.

³⁸ Tentu, artikel ini tidak dalam kapasitas membahas isu ini secara komprehensif dari perspektif fikih Islam. Pembaca dipersilahkan melacak sendiri dalam literatur-literatur yang relevan.

³⁹ Hilmy, “The Politics of Retaliation”, 151.

melenyapkan salah satu tokoh JIL.⁴⁰ Label yang disematkan oleh kelompok fundamentalis terhadap kelompok liberalis semacam itu menegaskan bagaimana keduanya tidak mungkin bertemu pada satu titik kebersamaan (*common point*).

Alasan ketiga, dan ini adalah alasan terpenting, adalah keterkaitan tiap kelompok tersebut dengan *patron* masing-masing yang menyokong eksistensi mereka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ideologi yang diusung dan diperjuangkan oleh masing-masing kelompok di atas sangat terkait erat dengan ideologi transnasional dan global. Dalam hal ini, kelompok Muslim fundamentalis-ekstremis di Indonesia merupakan pengusung ideologi Wahabi. Kelompok ini mendapat dukungan dari Arab Saudi. Sementara itu kalangan liberalis adalah kepanjangan tangan dunia Barat, terutama AS. AS adalah penyokong utama bagi kelompok ini. Meski nampaknya kedua negara tersebut “bersahabat”, namun sejatinya mereka adalah musuh. Jika masing-masing negara mengklaim bahwa mereka adalah mitra, tetapi kemitraan tersebut hanya dikarenakan masing-masing memiliki kepentingan pragmatis. Arab Saudi memiliki kepentingan membeli senjata militer mutakhir buatan AS demi menjamin eksistensi mereka tetap berada di atas dan mengungguli negara-negara di Semenanjung Arabia, sementara itu AS berkepentingan terhadap pasokan minyak sekaligus menunjukkan kedigdayaannya di mata para pemimpin negara-negara dunia. Aspek *patron-client* inilah yang, sekali lagi, menjadikan kontestasi antara kedua kelompok tersebut, nampaknya, masih akan berlanjut dalam episode yang panjang atau bahkan tiada henti.

Walhasil, uraian dan ilustrasi di atas menjadi bukti sah bagaimana kelompok Islam fundamentalis dan liberalis sangat berlawanan dalam memahami doktrin-doktrin keagamaan sekaligus saling berebut makna dalam ranah sosial-keagamaan. Sepertinya hal ini juga menegaskan bahwa dua kelompok yang berada dalam dua aras yang berseberangan ini akan sulit menemukan titik temu. Jika ini yang terjadi, maka umat Islam, khususnya di Indonesia, masih akan dihadapkan pada pekerjaan rumah, yaitu permasalahan sosial-keagamaan yang ditimbulkan karena kontestasi dua kelompok berbeda ideologi tersebut.

Untuk menegaskan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, penulis ingin meminjam penjelasan Azyumardi Azra terkait sulitnya

⁴⁰ Ibid.

mencari titik temu bagi kedua kelompok tersebut. *Pertama*, sejak kemunculannya, fundamentalisme dalam Islam “memproklamirkan” dirinya sebagai *oppositionalism* (ideologi perlawanan) terhadap “anak-anak” modernitas. Dalam pandangan kelompok fundamentalis, liberalisme merupakan salah satu “anak kandung” modernisme. *Kedua*, jika kelompok Muslim liberal sangat menjunjung tinggi hermeneutika sebagai pisau analisa dalam memahami, terutama, al-Qur’ān, kelompok Muslim fundamental dengan tegas menolaknya. Kelompok fundamentalis sangat literalis dan skripturalis dalam memahami ayat-ayat al-Qur’ān. Inilah salah satu titik perbedaan paling tajam antara kedua kelompok tersebut. *Ketiga*, jika kelompok Muslim liberal dengan liberalismenya juga “menelorkan” pemikiran tentang pluralisme agama, kalangan fundamentalis menentang paham tersebut secara tegas dengan alasan bahwa pluralisme agama berujung pada relativisme agama. *Keempat*, jika kelompok Muslim liberal cenderung “gegabah” (ini adalah istilah penulis sendiri) dalam memahami aspek historisitas dan sosiologis dalam rentang sejarah Islam hanya demi alasan progresivitas, kelompok fundamentalis justru menolak perkembangan historis dan sosiologis dengan alasan bahwa hal tersebut telah menyebabkan umat Islam menjauh dari doktrin literal kitab suci (al-Qur’ān).⁴¹

Catatan Akhir

Fenomena gerakan fundamentalisme *vis-à-vis* gerakan liberalisme, dengan demikian, merupakan problem tersendiri yang dihadapi oleh agama, tidak terkecuali Islam. Fenomena kedua gerakan tersebut ada hampir dalam internal semua agama. Penjelasan yang dikemukakan di atas, disertai dengan contoh yang terjadi dalam agama Islam khususnya Islam Indonesia, menunjukkan betapa agama—yang salah satu misinya adalah membawa damai—justru menjadi “ajang kontestasi” para penganutnya yang terdikotomi ke dalam kelompok-kelompok berbeda dan berlawanan.

Umat Islam di Indonesia secara umum sebaiknya melihat kontestasi antara kelompok Islam fundamental dan Islam liberal, termasuk di dalamnya perbedaan terkait interpretasi doktrin-doktrin keagamaan, secara bijaksana. Sebagai permasalahan sosial-keagamaan, fenomena tersebut perlu dianggap sebagai dinamika yang secara wajar terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang

⁴¹ Lebih lanjut lihat Azra, *Pergolakan Politik Islam*, 109-110.

sangat plural dan heterogen ini. Dalam konteks ini, umat Islam perlu menjadi penganut agama yang cerdas.

Sebagai penganut agama yang cerdas, perbedaan yang ada di antara kedua kelompok tersebut seharusnya bisa dikelola dengan baik. Hal tersebut bertujuan agar umat Islam tidak terjebak pada fanatisme buta (*blind fanaticism*) yang justru merugikan mereka sendiri dan Islam. Dengan kata lain, perbedaan dalam hal apapun, termasuk perbedaan dalam memahami doktrin-doktrin keagamaan, seharusnya dilihat sebagai sebuah keniscayaan, sehingga umat Islam bisa menghadirkan sikap damai dan saling menghargai perbedaan tersebut.

Di atas semuanya, bagaimanapun ini tidak untuk mengatakan bahwa agama bermasalah, karena yang menjadikan polemik dan masalah itu ada adalah para penganut agama itu sendiri. Bahkan, menurut perspektif fungsionalisme dalam disiplin sosiologi, agama (sebagai salah satu pranata sosial)—sampai dengan saat ini—tetap memainkan peran dan fungsi yang sangat vital dalam menjaga masyarakat berada dalam equilibriumnya. Dengan kata lain, agama merupakan *shared values* yang mampu menyatukan masyarakat. Selain itu, di luar berbagai potensi konflik yang bisa ditimbulkan agama, agama masih dan tetap sangat dibutuhkan oleh manusia.

Daftar Rujukan

- ‘Ak (al), Khālid ‘Abd al-Rahmān. *Ṣafwat al-Bayān li Ma‘āni al-Qur‘ān al-Karīm*. Beirut: Dār al-Bashā’ir, 1994.
- Appleby, R. Scott. *The Ambivalence of the Sacred*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2000.
- Azis, Abdul. ”Ekstremisme Sulit Dibendung Tanpa Keadilan”, <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/73543/ekstremisme-sulit-dibendung-tanpa-keadilan>. Diakses pada 16 Januari 2012.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Barber, Benjamin R. *Jihad vs. McWorld*. New York: Ballantine Books, 1995.
- Bruce, Steve. *Fundamentalisme*, terj. Herbhayu Noerlambang. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Bruinessen, Martin van. “Genealogies of Islamic Radicalism in post-Suharto Indonesia,” *South East Asia Research*, Vol. 10, No. 2, Juli, 2002.
- “Ekstremisme”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Ekstremisme>. Diakses pada 15 Januari 2012.

- Fealy, Greg. "Islamic Radicalism in Indonesia: The Faltering Revival?" *Southeast Asian Affairs*. Singapore: ISEAS, 2004.
- Hanani, Silvia. *Menggali Interelasi Sosiologi dan Agama*. Bandung: Humaniora, 2011.
- Hassan, Riaz. *Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim*, terj. Jajang Jahroni. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Hilmy, Masdar. "The Configuration of Radical Islamism in Indonesia: Some Contemporary Assessments and Trajectories", *al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 14, No. 1, Mei, 2014.
- "The Politics of Retaliation: The Backlash of Radical Islamists to Deradicalization Project in Indonesia", *al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 51, No. 1, 2013 M/1434 H.
- Hofmann, Murad W. *Menengok Kembali Islam Kita*, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Pustaka Hidayah, 2002.
- <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. Diakses pada 15 Januari 2012.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme>. Diakses pada 16 Januari 2012.
- <http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2011/08/01/15678/gerakan-ekstremisme-terjadi-pada-semua-komunitas-umat-beragama/>. Diakses pada 15 Januari 2012.
- <http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2011/08/01/15678/gerakan-ekstremisme-terjadi-pada-semua-komunitas-umat-beragama/>. Diakses pada 15 Januari 2012.
- Khoir, Tholkhatul. "Tujuh Karakter Fundamentalisme Islam", *al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 14, No. 1, Mei, 2014.
- Lewis, Bernard. *The Crisis of Islam*. New York: The Modern Library, 2003.
- Munjid, Achmad. "Militant and Liberal Islam: The Unwanted Twin Children of Modernization—an Indonesian Experience", *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 3, No. 1, Juni, 2009.
- Nurrochman. "Teologi Humanis: Upaya Mengikis Ekstremisme Islam", <http://journalsosiologiagama.blogspot.com/>. Diakses pada 20 Januari 2012.
- Paramadina, Tim Penulis. *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2005.

- Qardhawi, Yusuf. *Masa Depan Fundamentalisme Islam*, terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Russell, Bertrand. *Bertuhan tanpa Agama*, terj. Imam Baehaqi. Yogyakarta: Resist Book, 2008.
- Yunanto, Sri. *Islam Moderat vs Islam Radikal*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2018.
- Zada, Khamami. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2002.
- Zeitlin, Irving M. *Memahami Kembali Sosiologi: Kritik terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.